



HARIAN PAGI
tribun Jogja
A PART OF
tribunnews.com
JUMAT WAGE
4 OKTOBER 2024
RABIUL AKHIR 1446
NO 4736 / TAHUN 14
TERBIT 12 HALAMAN

Waspada Putus Kerja

■ Dampak Besar Lesunya Ekonomi Indonesia

KULON PROGO, TRIBUN - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo mencatat adanya tren peningkatan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tahun ini. Peningkatannya pun terbilang signifikan. Kepala Disnakertrans Kulon Progo, Bambang Sutrisno mengungkapkan, peningkatannya mencapai empat kali lipat jika dibandingkan tahun 2023. "Kalau di 2023 lalu tercatat ada 163 pekerja terkena PHK, tahun ini melonjak jadi 633 pekerja yang terkena PHK," jelasnya, Kamis (3/10).

Sejumlah 633 pekerja yang terkena PHK tersebut merupakan data yang diterima Disnakertrans Kulon Progo hingga 24 September 2024. Berdasarkan kelom-

... 2023 lalu tercatat ada 163 pekerja terkena PHK, tahun ini melonjak jadi 633 pekerja yang terkena PHK.

● ke halaman 11

Waspada Putus

• Sambungan Hal 1

pok umurnya, pekerja yang terkena PHK adalah yang berumur 18-30 tahun, alias usia produktif.

Menurut Bambang, gelombang besar PHK terjadi akibat tutupnya empat perusahaan besar di Kulon Progo. Perusahaan-perusahaan tersebut berada di Kapanewon Wates dan Sentoio. Akibatnya, PHK menjadi pilihan yang harus dilakukan akibat penutupan produksi. Sebagian perusahaan melakukan PHK dengan alasan kebijakan perputaran karyawan. Banyak pekerja yang terkena PHK ini berstatus sebagai karyawan kontrak.

Adapun Disnakertrans Kulon Progo telah berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK. Antara lain, memastikan proses PHK dilakukan sesuai regulasi. Seperti memastikan urusan pesangon pekerja segera diselesaikan. Pun nominalnya harus sesuai dengan regulasi.

Pihaknya pun akan membantu pekerja yang di-PHK agar bisa melakukan klaim jaminan kehilangan pekerjaan. Mereka juga dituntut untuk segera mengurus peralihan status BPJS Ketenagakerjaan ke kalurahan agar bisa diusulkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pekerja yang terkena PHK juga diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dari Disnakertrans Kulon Progo. Termasuk mendapatkan layanan konsultasi terkait kondisinya.

Terpisah, Ketua Serikat Pekerja Kulon Progo, Taufik Riko, belum bersedia memberikan tanggapannya terkait tren PHK ini. Namun sebelumnya ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah tentang pemotongan gaji pekerja untuk berbagai program. Menurutnya, berbagai rencana tersebut akan semakin membuat pekerja semakin terbebani. Apalagi saat ini kondisi ekonomi kurang begitu baik dengan lesunya daya beli.

Kota Yogya
Dinas Sosial, Ketenaga-

kerjaan dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Yogyakarta mencatat, sampai bulan September 2024 terdapat 71 pekerja yang terkena PHK. "Memang tidak terlihat signifikan. Itu juga bukan karena PHK massal seperti yang terjadi di daerah lain," kata Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosakertrans Kota Yogyakarta, Pipin Andhiantari, Kamis (3/10/24).

Puluhan kasus PHK tersebut tidak menimpa para buruh dari satu perusahaan saja, namun ada beberapa. Dia memastikan, sampai sejauh ini Kota Yogyakarta belum terdampak gelombang PHK seperti daerah-daerah lain di tanah air. "Belum terdampak dan semoga tidak terdampak. Apalagi, di kota ini kan tidak ada industri besar. Dulu memang sempat ada pabrik tekstil, tapi sudah lama berhenti produksinya," ungkapnya.

Pipin menguraikan, pariwisata yang kembali menggeliat selepas pandemi Covid-19 dinilai mampu menekan gelombang PHK di Kota Pelajar. Bukan tanpa alasan, sektor jasa pariwisata, seperti perhotelan, berhasil menyerap banyak tenaga kerja, seiring dengan melonjaknya tingkat okupansi. Perhotelan tidak terdampak gelombang PHK. Jadi, bisa dikatakan, pariwisata masih menjadi penggerak ekonomi di Kota Yogyakarta.

Fenomena tersebut tentu berbanding terbalik dengan situasi kala virus corona masih merebak, di mana kala itu banyak hotel yang terpaksa merumahkan karyawannya. Menurut Pipin, kondisi saat ini sudah berangsur pulih, dengan keramaian pelancong yang semakin tampak di seputaran Kota Yogyakarta. "Bahkan, sekarang lebih bergairah. Akhir-akhir ini okupansi (hotel di Kota Yogyakarta) kelihatannya bagus terus itu," urainya.

Meski gelombang PHK tidak terlaui dirasakan, Pipin tidak menampik, sengketa antara buruh dan perusahaan di Kota Yogyakarta masih seringkali dijumpai. Khususnya, terkait peme-

nuhan hak-hak pekerja yang dinilai tidak sesuai kesepakatan, seperti keterlambatan pembayaran gaji, tunjangan hari raya (THR), dan sebagainya. Beberapa kasus ada yang selesai dengan mediasi, perjanjian bersama. Tapi, ada pula yang harus sampai ke tingkat Perselisihan Hubungan Industrial.

Gunungkidul
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja (DPKUKM-TK) Gunungkidul, Supratono menyebutkan, saat ini pihaknya belum menerima adanya laporan PHK besar-besaran di wilayahnya. Kondisi berbeda terjadi pada tahun lalu, di mana sebanyak 231 orang harus kehilangan pekerjaannya.

PHK besar-besaran pada tahun lalu menurut Supratono merupakan imbas kondisi politik global. Terutama akibat terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia di dataran Eropa Timur. Hal ini memicu gangguan terhadap pasar global. Demikian pula, teras hingga Bumi Handayani. Sebab, mayoritas perusahaan itu melakukan aktivitas ekspor produk olahannya. Saat pasar melesu, pengurangan karyawan menjadi hal tak terelakkan.

Sedangkan kondisi tahun ini menjadi berbeda karena hanya ada dua perusahaan besar yang kini beroperasi di Gunungkidul. Lainnya diisi oleh perusahaan menengah hingga kecil yang jumlah pekerjanya pun relatif tidak banyak. Adapun, perusahaan besar di Gunungkidul yakni, PT Woneel Midas Leathers yang memproduksi sarung tangan, dan PT Komitrando yang terjun di industri tas.

Sieman
Di Sieman, PHK berangsur muncul disebut terjadi pada pekerja ritel ataupun pertokoan. Ketua DPC KSPSI Sieman, Yuliadi mengatakan, PHK ini disebabkan sejumlah faktor. Tapi umumnya karena posisi ritel yang kalah saing dengan menjamurnya toko daring. "Orang rebahan sekarang bisa berbelanja. Mau beli makanan, bisa datang sendiri. Pembeli juga bisa membandingkan

harga. Online juga tidak membutuhkan tenaga kerja banyak," katanya, Kamis (3/9).

Kendati demikian, dia mengungkapkan jika PHK tidak terjadi di semua sektor. Hanya di sektor ritel atau pertokoan. Terkait jumlah, dia belum bisa menyebutkan karena pihaknya juga mengamati apakah ketika memutuskan hubungan kerja si pemilik kerja dalam kurun waktu seminggu atau sebulan membuka lowongan kerja lagi atau tidak.

Jika ternyata membuka lagi, maka sebenarnya bukan dalam kondisi sulit. Dia menduga, itu sia-sia perusahaan mengurangi karyawan dan menggantinya dengan pekerja kontrak. "Artinya ini menjadi tanda tanya besar. Mereka enggak keliru sih, yang keliru negara menggunakan undang-undang cipta kerja," ujar Yuliadi.

Sementara itu, Ketua SBSI DIY, Dani Eko Wiyono, berpendapat jika daya beli masyarakat kian lesu dan ekonomi sedang tidak baik baik saja. Tandanya sudah terlihat dengan perusahaan yang sudah mulai aneh-aneh. Ia mencontohkan, ada pekerja yang sudah bekerja 10 tahun dan akan memasuki usia pensiun di bulan Oktober ini. Jika dilihat dari uang penstunnya sekitar Rp140 jutaan. Namun perusahaan seperti tidak meritohi pekerja itu untuk pensiun dengan baik. Sebab uang pensiun yang harus dikeluarkan perusahaan cukup besar.

"Maka dibuat kasus agar dia resign. Dan kasusnya tidak masuk akal, yaitu pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual ini kan jelek, dalam undang-undang PHK mendesak, maka bargaining-nya daripada kamu di-PHK mendingan kamu resign," ujar dia.

Tanda berikutnya, mulai banyak perputaran pekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan memberhentikan pekerja kemudian merekrut karyawan baru. Selain itu, tanda kelesuan ekonomi juga bisa dilihat dari pengguna pinjaman online yang kian masif. (als/ak/ndg/rif/han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005